

# Pengalaman Bersama Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku (NTT) dan Puspita Bahari (Jateng): Pendekatan Berbasis Gender

**Mida Saragih**  
Koordinator Nasional  
Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI)

# Defenisi Pemberdayaan

- Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuannya supaya perempuan dapat berperan aktif dalam pemecahan masalah (LPPM–UGM, 2007: 1).

# Latar Belakang

- **Sebagai ideologi, patriarki menyatu dalam budaya manusia.** Ini mempengaruhi aturan-aturan (tertulis/ tak tertulis) yang mengatur hubungan antara laki-laki & perempuan, contohnya: eksploitasi, marjinalisasi, domestifikasi, dsb.
- **Menurut Walby (1990: 20), patriarki membentuk struktur-struktur sosial.** Berdasarkan wilayah pengaruhnya, patriarki dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yakni: patriarki publik dan patriarki privat. Patriarki privat ada pada rumah tangga yang represif terhadap perempuan. Sementara patriarki publik berpijak pada lingkungan publik, seperti lapangan kerja dan negara. Keduanya berlangsung terus-menerus (kontinum) dan tidak terpisah.

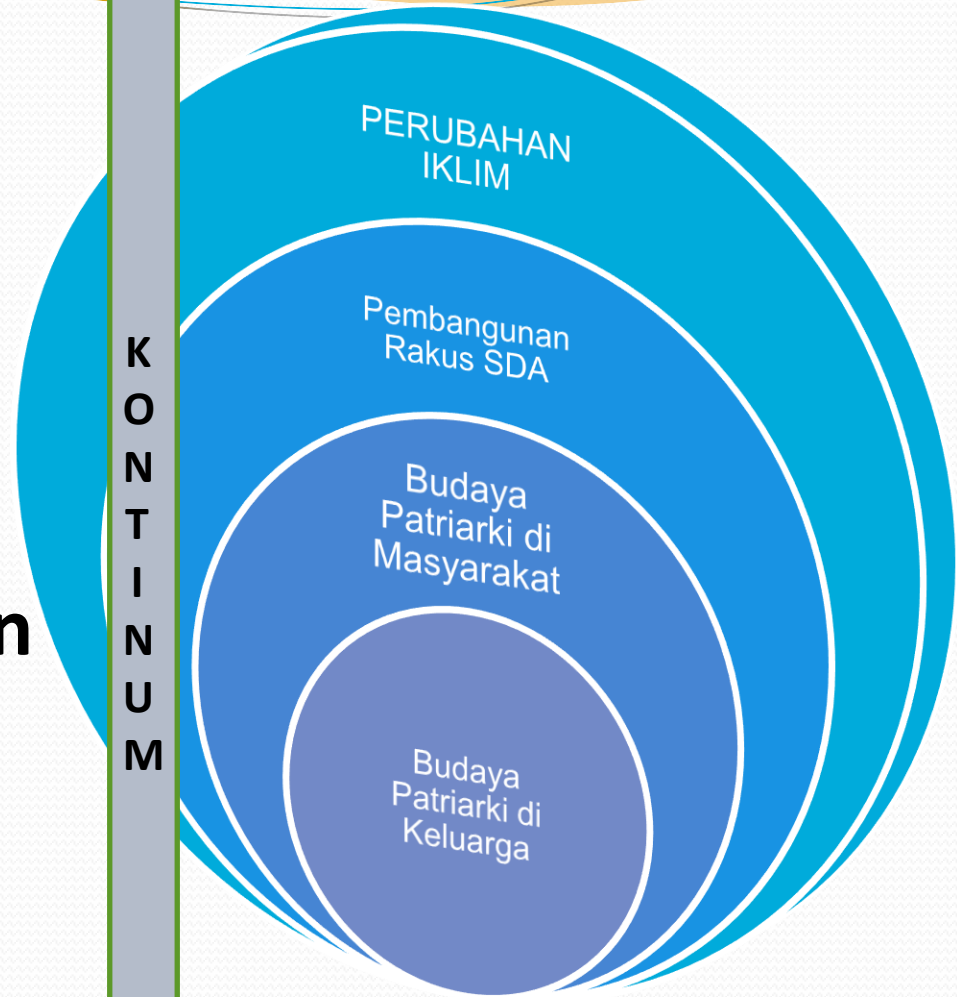
# Lapisan-lapisan Ketidakadilan Gender = Tantangan menuju Keadilan Gender

- **Tugas dan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan publik seringkali tersembunyi dibalik tugas suaminya.** Apa yang mereka lakukan tidak tampak penting, karena mereka kurang diakui.
- **Pelabelan negatif dari masyarakat kelas bawah dan ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bekerja dan aktif berorganisasi.**
- **Daya dukung lingkungan yang terus menurun** karena pembangunan yang rakus air, tanah dan SDA lainnya.
- **Kebijakan terkait perubahan iklim yang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara utuh,** khususnya pada bidang pertanian dan perikanan. Misal: pembagian beras saat paceklik atau mendorong penggunaan pestisida ketika terjadi serangan hama.

Ruang-ruang  
yang sepi  
diperhatikan!

# Lapisan- lapisan Ketidakadilan Gender

K  
O  
N  
T  
I  
N  
U  
M



# Pendekatan Kajian dan Program CSF-CJI

- **Wawancara** dengan masyarakat dan pemimpin masyarakat. Wawancara tidak dalam artian “tanya jawab”, lebih merupakan dialog atas konteks kehidupan subjek.
- **Observasi** atas pembagian kerja antara perempuan & laki-laki dalam keluarga dan komunitas, interaksi sosial dan kondisi lingkungan.
- **Dokumentasi.** Membuat catatan dan rekaman secara berkelanjutan, dalam bentuk foto, audio visual dan suara.
- **Mengumpulkan dan menganalisa data sekunder.**
- **Memfasilitasi pendidikan dalam berbagai bidang seturut kebutuhan lapangan**, seperti: pengetahuan berorganisasi, kepemimpinan, pertukaran pengalaman terbaik, pengetahuan legal dan para legal, serta membangun dialog kritis-membangun dengan pemerintah. \* \* \*
- **Memproduksi dokumentasi hidup**, yang menjadi catatan sejarah peran perempuan dalam mengelola pangan, mengatasi dampak iklim, serta masalah-masalah sosial lainnya.
- **Merawat dialog secara konsisten.** Perlu saling belajar dengan kelompok perempuan, karena mereka merupakan subjek dalam kajian dan program. \* \* \* \*

# Beberapa Temuan Lapangan: Pendapat Perempuan tentang Kemiskinan, Ideologi Patriarkis dan Lingkungan

- **Dalam menyikapi ideologi gender yang patriarkis**, setiap perempuan melakukan redefinisi atau pemaknaan ulang. Ada di antaranya yang kembali jatuh dalam pemahaman patriarkis, misal: memakai sebutan “perawan tua” bagi perempuan yang blm menikah pada usia cukup matang. Tapi, ada juga yang mampu meredefenisi di luar pemahaman patriarkis, dengan menyatakan pentingnya “reposisi” yakni penyetaraan posisi perempuan & laki-laki. Ini lebih pada upaya mengatasi marginalisasi perempuan, misal: pada kasus KDRT, para anggota kelompok melakukan pemulihan psikologis sampai pendampingan korban di pengadilan.
- **Perempuan punya kecenderungan memperlakukan lingkungan hidup sebagai saudara.** Tidak ada basmi-membasmi. Misal: penanaman mangrove secara swadaya, karena mereka paham manfaat mangrove bagi pemeliharaan stok air, kesuburan pesisir dan sumber mata pencaharian. Contoh lain: daur ulang sampah plastik.
- **Ketikan membicarakan gender, maka kita “mau tidak mau” berbicara masalah lingkungan, perekonomian dan kondisi sosial.** Tidak ada sekat di antara aspek-aspek tersebut.

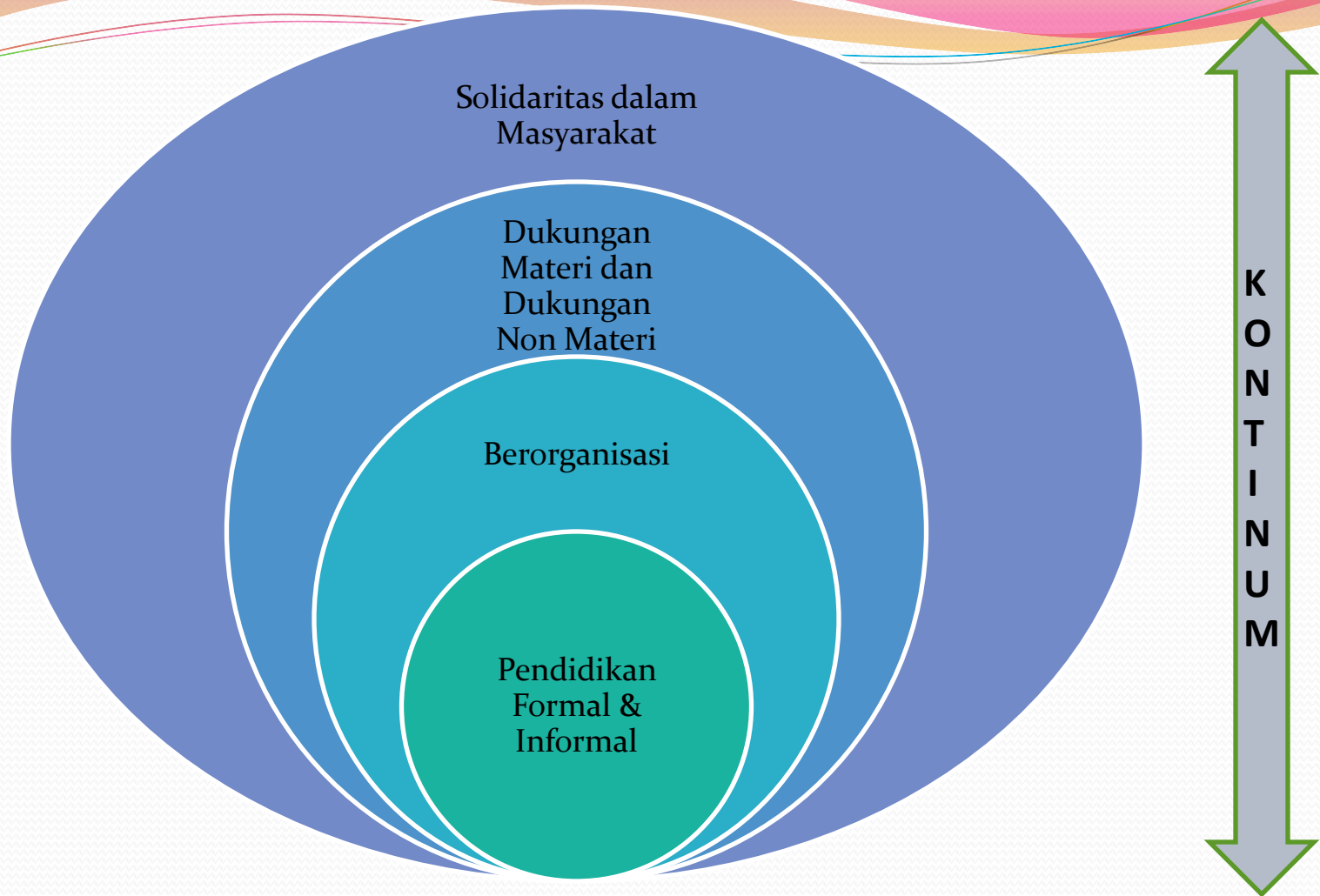


## Beberapa Temuan Lapangan: Pendapat Perempuan tentang Kemiskinan, Ideologi Patriarkis dan Lingkungan

Pada perempuan di Desa Morodemak, Jateng ada yang beranggapan penyebab kemiskinan adalah nasib/ takdir, dan cenderung menerima tanggung jawab sebagai pengurus rumah tangga, dan suami mencari nafkah. Tapi ada yang menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang “dapat ditawar”. Mereka akan berusaha mengatasi kemiskinan dengan cara beragam, yakni:

1. Saat pendapatan suami menurun di musim paceklik, perempuan mengandalkan utang, mis: berutang pada tengkulak dan warung. Ada di antaranya yang menggadaikan barang, ikut arisan, ataupun menjual apa yang dapat dijual saat paceklik.
2. Bekerja. Bagi perempuan dari masyarakat kelas bawah, bekerja adalah respon terhadap kemiskinan. Mereka melakukan pekerjaan sebagai keharusan, mulai jadi buruh tani, buruh pengupas ikan dll.
3. Perempuan menghadapi kemiskinan dengan “stock of knowledge” atau pengalaman yang menjadi bekalnya melakukan tindakan sosial. Contoh: mengenal hak-hak konstitusi, pengetahuan bertenun dan bertani, memahami cara berorganisasi, manajemen pasca produksi dengan memakai bahan baku ekonomis dsb. Dengan pengalaman yang ada, mereka bertahan dan berinovasi dalam bertindak. Selanjutnya, mereka punya kebiasaan membagikan “stock of knowledge” tsb dan mereplikasi kemajuan-kemajuan yang ada.





**Pencapaian kaum perempuan Mollo, NTT dan Puspita Bahari, Jawa Tengah: “Struktur sosial seperti budaya patriarki—tidak selalu menjadi penentu tindakan sosial perempuan.”**

## Beberapa Temuan Lapangan: Modalitas Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku (NTT) dan Puspita Bahari, Jateng

- *Kearifan lokal* yang dibagikan secara turun-temurun. Para mama di Mollo mengajarkan kepada anak-anaknya “untuk makan apa yang dapat mereka tanam.” Ini artinya setiap orang wajib mengerti mengolah bumi dengan bijak, sehingga tidak kelaparan di saat krisis. Ini mereka buktikan dengan kembali pada pangan lokal. Segala sesuatu mesti ditanam dan diolah, sehingga tidak bergantung pada pasokan di luar Mollo.
- *Penopang bidang pertanian dan perikanan*, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran dan distribusi pangan.
- *Kemauan, pengetahuan dan pengalaman berorganisasi*, yang menjadi sarana pendidikan, arena melatih kepemimpinan, manajemen, berjaringan, melatih kepedulian kepada sesama dsb.
- *Pengetahuan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan*. Misal, memproduksi tenun untuk bertahan di masa krisis, memproduksi produk bernilai tambah dari bahan baku ikan dan mangrove.
- *Pengetahuan pendampingan hukum, pemahaman hak-hak konstitusional dan pengetahuan manajemen produksi serta pasca produksi*.

# Rekomendasi

- **Situasi:** perempuan dari masyarakat kelas bawah tidak sepenuhnya menyerap nilai-nilai diskriminasi, marginalisasi dan budaya patriarki. Mereka menyadari itu semua tidak sesuai dengan pemikiran mereka.
- **Rekomendasi:** pemerintah perlu memahami perempuan sebagai individu yang kreatif dan otonom, yang mampu melakukan redefinisi atas budaya patriarki, serta dapat mengupayakan pemecahan masalah di masyarakat. Sehingga dalam pembuatan program/ kebijakan, pemerintah perlu menempatkan kaum perempuan sebagai subjek, bukan objek. Pemerintah sudah semestinya bertanya dan berdialog dengan kepada mereka, terkait apa yang mereka butuhkan agar hidup sejahtera sesuai amanat UUD 1945. Sehingga negara tidak terjebak pada program/ kebijakan karikatif.
- Pemerintah perlu menyertakan kebutuhan perempuan secara spesifik dalam Rencana Aksi serta Kebijakan terkait Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim.

# Rekomendasi

- **Situasi:** adanya pemiskinan perempuan dari masyarakat kelas bawah. Pekerjaan di bidang perikanan dan pertanian bukan hal mudah. Keduanya memerlukan proses yang panjang. Para perempuan mesti telaten, sementara modal dan keuntungan tidak besar. Mereka juga tidak terlindungi secara hukum. Di sektor perikanan, perempuan ikut menjaring ikan, menampung tangkapan sejak dini hari, membersihkan ikan dan berdagang dari pagi hingga siang, menangkap udang dan kerang dsb. Di pertanian, ada yang ikut menyiangi lahan, memilah benih, menanam, memanen tanaman, menyimpan stok pangan dsb. Belum lagi “musim yang tidak biasa” dapat berimbas pada penurunan produksi. Ini membuat mereka semakin terbenam dalam kemiskinan. Sayangnya, perempuan petani dan nelayan yang tidak mendapat pengakuan. **Domain-domain kaum perempuan hilang dalam statistik dan aturan hukum.**
- **Rekomendasi:** Mendorong relasi gender yang lebih egaliter melalui pengembangan wacana yang membongkar hegemoni patriarki. Ini dilakukan dengan cara membagikan stock of knowledge atau pengetahuan perempuan, agar masyarakat dapat mempunyai pemahaman setara tentang keadilan gender itu sendiri. Stock of knowledge adalah cadangan pengetahuan yang dinamis dan dapat mengalami redefenisi. Ia dapat dibagikan dalam ranah yang luas, seperti dialog warga, perluasan organisasi dsb.

# Rekomendasi

- **Situasi:** Ketidakadilan terhadap perempuan masih bersarang dalam aturan hukum yang meniadakan peran perempuan dan ruang-ruang hidupnya. Seperti UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dan UU Perikanan No. 45 Tahun 2009—sama sekali tidak menyebutkan pengakuan peran perempuan, terlebih perlindungan kepada perempuan pengelola pangan.
- **Rekomendasi:** 1) dalam mengatasi patriarki publik, para pembuat kebijakan tak bisa mengabaikan persoalan pentingnya “reposisi” dalam kebijakan. Aturan hukum mesti memuat pengakuan dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. 2) mendorong pembangunan berperspektif gender, yakni pendekatan yang mengintegasi aspirasi, kepentingan serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam strategi pembangunan di berbagai bidang.

# Rekomendasi

- **Rekomendasi: khusus terkait pangan dan perubahan iklim,** pemerintah juga punya banyak tugas seperti memberikan dukungan program dan anggaran kepada prakarsa penyelamatan lingkungan, mengembangkan sistem adaptasi iklim dan peringatan dini, pendampingan, penyediaan informasi iklim ke kampung-kampung, mendukung lumbung pangan serta kebijakan pendukung lainnya.
- **Rekomendasi:** langkah berikutnya Pemerintah baik pusat dan daerah juga wajib menyediakan program dan anggaran untuk meningkatkan kapasitas para perempuan, mulai dari pendidikan, permodalan, dan bantuan hukum.